

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mendasari terjadinya perdagangan ilegal telur penyu serta bagaimana relasi antar aktor dalam proses perebutan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam yang ada di kawasan Paloh, Kalimantan Barat. Indonesia merupakan salah satu tempat habitat penyu di dunia terdapat 6 dari 7 jenis penyu dunia yang bertelur, mencari makan, dan bermigrasi. Penyu dilindungi habitatnya dan masuk dalam Red List IUCN dan CITES. Pemanfaatan telur penyu oleh masyarakat tidak mengindahkan aspek kelestariannya dan diperdagangkan secara ilegal di perbatasan Paloh – Teluk Melano (Serawak). Munculnya aktor politik dan konservasi wilayah sebagai bentuk tindakan ilegal perburuan telur penyu membuat WWF kemudian mengambil peran dalam konservasi penyu di Paloh dan melakukan upaya-upaya untuk mendorong terbentuknya wilayah konservasi di Paloh. Fenomena teritorialisasi kawasan konservasi yang dilakukan oleh WWF berdampak pada berkurangnya perburuan dan perdagangan ilegal telur penyu di wilayah Paloh. Pemerintah melalui BKSDA belum maksimal dalam meningkatkan peran dan pengawasannya terutama di wilayah perbatasan dan pengembangan wilayah di Paloh agar perdagangan telur penyu dapat berkurang dan memajukan masyarakat Paloh dengan mengedepankan nilai-nilai pelestarian alam yang bertanggung jawab sehingga perekonomian wilayah Paloh dapat terangkat. Namun upaya teritorialisasi dan konservasi yang dilakukan oleh WWF maupun Pemerintah lewat BKSDA berbenturan dengan upaya masyarakat yang memanfaatkan telur penyu secara turun temurun di wilayah Paloh.

Kata kunci : Ekonomi politik, perdagangan ilegal, telur penyu, perbatasan, teritorialisasi.

ABSTRACT

This thesis aims to determine the factors that underlie illegal trade of turtle eggs as well as the relationships between actors in the process of the struggle for access to and control over natural resources in the area of Paloh, Kalimantan Barat. Indonesia is one of the turtle habitat in the world there are six of the seven species of sea turtles world nesting, foraging, and immigrated turtle habitats are protected and included in the IUCN Red List and CITES. Utilization of turtle eggs by community ignores aspects of sustainability and traded illegally in the border Paloh - Teluk Melano (Sarawak). The emergence of political actors and conservation area as a form of illegal action poaching of turtle eggs make WWF then take part in turtle conservation in Paloh and make efforts to encourage the establishment of conservation areas in Paloh. The phenomenon territorialising conservation area by WWF impact on the reduction of poaching and illegal trade in turtle eggs Paloh region. Government through BKSDA not maximized in improving its oversight role and especially in border regions and regional development in order to trade Paloh turtle eggs can be reduced and promote community Paloh by promoting the values of nature preservation in charge so that the economy can be lifted Paloh region. However territorialising and conservation efforts carried out by WWF and the Government through BKSDA collide with the efforts of people who use the turtle eggs from generation to generation in the region of Paloh.

Keywords: Political economy, illegal trade, sea turtle eggs, border, territorialization